

PEMKAB BEKASI OPTIMALKAN PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DI 2024



PAD : Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi membuka secara langsung kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2024, yang berlangsung di Hotel Holiday Inn Jababeka pada Rabu (31/07/2024). foto Arif Tiarno

Sumber gambar: <https://www.bekasikab.go.id/pemkab-bekasi-optimalkan-pendapatan-pajak-dan-retribusi-di-2024>

Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi membuka secara langsung kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2024, yang berlangsung di Hotel Holiday Inn Jababeka pada Rabu (31/07/2024). Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat mengejar capaian target penerimaan daerah khususnya dari sektor pajak maupun retribusi. Sebagaimana yang sudah ditetapkan pada awal penetapan APBD. "Kembali saya tekankan, khususnya kepada Dinas Penghasil PAD agar lebih optimal lagi dan memaksimalkan kinerja yang ada dalam meningkatkan penerimaan pendapatannya. Karena ini merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah," terangnya.

Sekda menyebutkan, capaian PAD Kabupaten Bekasi sampai dengan 30 Juli 2024 adalah sebesar 52.28 %, terdiri dari realisasi pajak daerah, realisasi retribusi daerah 50.00 %, realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta Realisasi lain-lain PAD yang sah. "Mari kita jadikan sebagai wadah koordinasi, diskusi dan saling bersinergi untuk bersama-sama mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah sebagai upaya membangun Kabupaten Bekasi lebih baik," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Ani Gustini menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan peningkatan PAD khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Dimana dalam kegiatan tersebut, Bapenda Kabupaten Bekasi turut mengundang beberapa narasumber di antaranya, Sukma Wahyudin selaku fungsional AKPD Ahli Muda pada Kemenkeu RI, Misra selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Kemenkeu RI beserta dengan Ni Putu Myari Artha selaku Analis Kebijakan pada Kemendagri RI.

Ani Gustini juga mendorong perangkat daerah yang capaian pendapatannya masih di bawah 50 persen untuk dapat memaksimalkan potensi di tahun 2024 agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. "Saya berharap pencapaian PAD Kabupaten Bekasi sampai dengan triwulan kedua tahun 2024 ini bisa mencapai sesuai target," ucapnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.bekasikab.go.id/pemkab-bekasi-optimalkan-pendapatan-pajak-dan-retribusi-di-2024>, "Pemkab Bekasi Optimalkan Pendapatan Pajak dan Retribusi di 2024", tanggal 31 Juli 2024; dan
2. <https://indonesiakini.go.id/berita/9593790/pemkab-bekasi-optimalkan-pendapatan-pajak-dan-retribusi-di-2024>, "Pemkab Bekasi Optimalkan Pendapatan Pajak dan Retribusi di 2024", tanggal 31 Juli 2024.

Catatan:

- Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam:
 1. Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan daerah.
 2. Pasal 28 Ayat (1) menyatakan bahwa Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 3. Pasal 28 Ayat (2) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran

- lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
4. Pasal 28 Ayat (3) menyatakan bahwa Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
 5. Pasal 30 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
 6. Pasal 31 Ayat (1) menyatakan bahwa Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 7. Pasal 31 Ayat (4) menyatakan bahwa lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerja sama daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. pendapatan bunga;
 - g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. pendapatan denda pajak daerah;
 - l. pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. pendapatan dari pengembalian;

- o. pendapatan dari BLUD; dan
 - p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pasal 34 Ayat (1) menyatakan bahwa Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:
- a. transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. transfer antar-daerah.
9. Pasal 34 Ayat (2) menyatakan bahwa Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. dana perimbangan;
 - b. dana insentif daerah;
 - c. dana otonomi khusus;
 - d. dana keistimewaan; dan
 - e. dana desa.
10. Pasal 34 Ayat (3) menyatakan bahwa Transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
11. Pasal 46 menyatakan bahwa Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:
- a. hibah;
 - b. dana darurat; dan/atau
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pasal 47 menyatakan bahwa Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pasal 48 menyatakan bahwa Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pasal 55 Ayat (1) menyatakan bahwa klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan

- d. belanja transfer.
15. Pasal 55 Ayat (2) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
 16. Pasal 55 Ayat (3) menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
 17. Pasal 55 Ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 18. Pasal 55 Ayat (5) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
 19. Pasal 70 Ayat (1) menyatakan bahwa Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan.
 20. Pasal 70 Ayat (2) menyatakan bahwa Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.
 21. 21. Pasal 70 Ayat (3) menyatakan bahwa Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
 - a. SiLPA;
 - b. pencairan Dana Cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 22. Pasal 70 Ayat (5) menyatakan bahwa Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan.
 23. Pasal 70 Ayat (6) menyatakan bahwa Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menutup defisit anggaran.
 24. Pasal 161 Ayat (1) menyatakan bahwa Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD.

25. Pasal 161 Ayat (2) menyatakan bahwa Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa
26. Pasal 162 Ayat (1) menyatakan bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya:
 - a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
 - b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
 - c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.
27. Pasal 163 menyatakan bahwa Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja.
28. Pasal 164 Ayat (1) menyatakan bahwa Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD.
29. Pasal 165 menyatakan bahwa Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf c diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD dan/atau RKA SKPD.
30. Pasal 166 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dalam rancangan perubahan APBD.
31. Pasal 166 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

32. Pasal 167 Ayat (1) menyatakan bahwa Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf e.
33. Pasal 167 Ayat (2) menyatakan bahwa Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
34. Pasal 167 Ayat (3) menyatakan bahwa Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.